

## STRATEGI PERCEPATAN INVESTASI KOTA SURABAYA

Mohammad Wahed<sup>1</sup>  
Wiwin Priana Primandhana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Indonesia

<sup>1</sup>e\_mail: [muhammadwahed124@gmail.com](mailto:muhammadwahed124@gmail.com)

<sup>2</sup>e\_mail: [wiwin.primadhana.ep@upnjatim.ac.id](mailto:wiwin.primadhana.ep@upnjatim.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis potensi ekonomi yang menjadi daya tarik utama investasi dan kondisi investasi serta merumuskan strategi kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah kota Surabaya dengan pendekatan *Exploratory* dan *Descriptive research* yang dilakukan secara bertahap. Berdasarkan hasil indeks *Location Quotient*, *Shift Share*, dan *Typology Klassen*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga sektor potensial di wilayah Kota Surabaya yaitu: Sektor *Transportasi*, Sektor *Penyediaan Akomodasi*, dan Sektor *Informasi*. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya. Disamping itu, terdapat 4 (empat) kebijakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat Investasi di wilayah Surabaya sesuai dengan hasil kajian; 1) peningkatan efisiensi birokrasi melalui penyerderhanaan prosedur perijinan usaha, regulasi dan *Law Enforcement*; 2) kebijakan peningkatan infrastruktur dengan memperluas infrastruktur fisik melalui penyediaan fasilitas utama; 3) perluasan akses pembiayaan dengan program memfasilitasi akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha *UMKM*; dan 4) peningkatan kerjasama dan promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui gelar potensi dan temu usaha. Penelitian ini dilakukan di Surabaya pada bulan November – Desember 2019.

**Kata Kunci:** *Potensi Ekonomi, Investasi, Kebijakan*

### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the type of economic potential that is the main attraction of investment and investment conditions and formulate policy strategies in accordance with the conditions of the city of Surabaya with *Exploratory* and *Descriptive research* approaches that are carried out in stages. Based on the results of the *Location Quotient* index, *Shift Share* and *Typology Klassen*. The results of this study concluded that there are three potential sectors in the Surabaya City area, namely: *Transportation Sector*, *Accommodation Provision Sector*, and *Information Sector*. With all its potential, facilities and geographical advantages. In addition, there are 4 (four) policies that can be carried out to accelerate investment in the Surabaya region in accordance with the results of the study; 1) increasing the efficiency of the bureaucracy through simplifying business licensing procedures, regulations and *Law Enforcement*; 2) infrastructure improvement policies by expanding physical infrastructure through the provision of key facilities; 3) expanding access to finance with programs facilitating access to finance, especially for *MSME* entrepreneurs; and 4) increasing cooperation and investment promotion both domestically and abroad through potential degrees and business meetings. This research was conducted in Surabaya in November - December 2019.

**Key Words:** *Economic Potential, Investment, Policy*

### PENDAHULUAN

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penanaman modal memiliki dampak multiplier effect yang cukup luas terhadap suatu perekonomian, diantara: 1) terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa; 2) penciptaan nilai tambah; 3) penggunaan tenaga kerja; 4) sumber daya ekonomi lainnya; 5) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 6) sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Ditingkat nasional, kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan mendorong *Foreign Direct Investment* dalam upaya memperbaiki daya saing ekonomi Nasional. Sedangkan

pengembangan penanaman modal di daerah berfungsi sebagai peningkatan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Penanaman modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang positif. Tujuan dari pembangunan itu sendiri secara keseluruhan adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan ekonomi, karena diharapkan keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dapat digunakan untuk mendorong pembangunan di bidang lainnya.

Pengembangan penanaman modal sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Sedangkan tujuan pembangunan ekonomi daerah: 1) menciptakan lapangan kerja; 2) mencapai stabilitas ekonomi daerah; 3) mengembangkan basis ekonomi yang beragam (Lincoln Arsyad, 1999). Lapangan kerja diperlukan agar penduduk mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sehingga diperlukan persyaratan antara lain tersedianya lahan, modal, prasarana. Stabilitas ekonomi daerah perlu dipertahankan agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya secara terencana. Stabilitas ekonomi yang dimaksud adalah 1) inflasi yang rendah; 3) adanya peraturan usaha yang jelas melalui penegakan hukum yang konsisten; dan 3) tidak adanya gangguan keamanan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah diperlukan strategi pembangunan ekonomi daerah, meliputi: pengembangan fisik/lokalisasi, pengembangan dunia usaha, pengembangan SDM, dan pengembangan masyarakat (Lincoln Arsyad, 1999). Pengembangan fisik dilakukan melalui penyediaan: a) lahan untuk kegiatan usaha; b) pengaturan tata ruang untuk berbagai kegiatan penduduk; c) menyediakan prasarana dan sarana seperti jalan; d) pelabuhan; e) listrik dan air bersih.

Untuk mengolah potensi ekonomi potensial menjadi riil salah satu sarana yang sangat penting adalah pengembangan investasi, karena dengan pengembangan investasi akan mendorong pada beberapa efek mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nasional/daerah maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan investasi; baik di bidang ekonomi maupun di bidang lainnya.

Studi perumusan strategi pengembangan penanaman modal dibangun dalam perspektif pengembangan daya saing daerah. World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing merupakan kemampuan perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Disamping itu, Institute of Management and Development (IMD) mendefinisikan daya saing merupakan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan melalui mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globalitas dan proksimitas, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial. Lebih lanjut, Departemen Perdagangan dan Industri Inggris mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional (Abdullah, et.al; 2002). Sedangkan Centre for Regional and Urban Studies (CURDS), Inggris, mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Dengan segala potensi, fasilitas, dan sumber daya daerah yang dimilikinya, maka pertumbuhan dan perkembangan aktifitas penanaman modal di Kota Surabaya sangat terbuka lebar. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kota ini belum mampu

mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level yang terus tumbuh. Salah satu upaya dalam memberikan gambaran akan peluang Investasi di Kota Surabaya adalah dengan menyediakan informasi tentang apa saja yang tersedia di Kota Surabaya baik Prasarana, Sarana maupun Kebijakan pendukung investasi. Dalam mendukung kebijakan Dalam menentukan potensi sektoral pada suatu wilayah, selain didasarkan pada kajian pemetaan investasi sebagaimana yang telah dilakukan, juga diperlukan suatu analisa lebih lanjut untuk memberikan penguatan analisa secara mendalam terkait potensi investasi sebenarnya yang ada sampai dihasilkan jenis potensi unggulan wilayah, dengan harapan sesuatu yang dihasilkan dari kajian itu bisa memberikan arahan dan informasi yang akurat dan jelas bagi para calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Surabaya. Untuk mendukung kegiatan di atas dan dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Surabaya, perlu adanya kajian terkait penyusunan peluang investasi di Surabaya sebagai pendukung terumuskannya pemetaan investasi yang dapat menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan peningkatan investasi Kota Surabaya. Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan dari penelitian penyusunan strategi percepatan investasi Kota Surabaya, sebagai berikut: untuk mengetahui jenis potensi ekonomi yang menjadi daya tarik utama investasi dan mengetahui kondisi investasi serta merumuskan startegi kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah kota Surabaya.

### ***Pertumbuhan Ekonomi***

Berbagai literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi seperti itu diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto atau Gross Domestik Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi berkaitan pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi bukan gambaran ekonomi pada suatu saat (statis), tetapi bagaimana perekonomian berkembang dari waktu ke waktu (dinamis). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya perkembangan atau perubahan dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan kenaikan output perkapita (Sukirno, 2006). Ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus melihat perkembangan output total dan jumlah penduduk. Suatu teori pertumbuhan ekonomi harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total dan teori mengenai pertumbuhan penduduk.

Aspek lain dari pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka Panjang (Sukirno, 2006). Kenaikan output perkapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti penurunan output perkapita bukan pertumbuhan ekonomi. Namun bisa saja terjadi pada suatu tahun terjadi penurunan output. Asalkan penurunan itu sifatnya sementara dan dalam jangka waktu yang panjang output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi.

### ***Potensi Ekonomi Daerah***

Potensi sektoral ekonomi daerah adalah suatu kondisi tertentu dimana perekonomian daerah dipetakan berdasarkan sektor usaha dalam PDRB dengan keunggulan-keunggulan tertentu pada setiap sektor usaha. Menurut (Ali & Bakar, 2018) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Di sisi lain, juga diperlukan faktor-faktor yang sangat penting yaitu teknologi dan sumber daya manusia (Pesurnay & Parera, 2018).

Menurut (Pratiwi & Warnaningtyas, 2017) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni 1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar; 2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif; 3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut; dan 4) sektor tersebut harus berkembang. Pengukuran potensi daerah dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat analisis. Alat analisis tersebut meliputi: 1) *Location Quotient* (LQ), dan 2) *Shift-Share* (S-S).

### **Konsep Investasi**

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi) Tujuan investasi adalah meningkatkan kapasitas produksi perekonomian di masa mendatang. Karena tingkat kesejahteraan rakyat, dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh pertumbuhan kapasitas produksi, maka tingkat investasi amat menentukan tingkat kesejahteraan rakyat dimasa mendatang.

Investasi umumnya dilakukan dalam beberapa bentuk Mesin-mesin, pabrik-pabrik dan peralatan produksi (*business fixed investment*), Residensial (*residential investment*), Persediaan (*inventory investment*). Karena investasi umumnya berorientasi jangka panjang, maka biaya dan manfaat yang dipertimbangkan para investor adalah ekspektasi biaya dan ekspektasi pendapatan. Dengan demikian kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang investasi, harus mempertimbangkan apakah kebijakan-kebijakan tersebut akan memperbaiki ekspektasi para pelaku ekonomi di masa mendatang. Umumnya kebijakan akan memperbaiki ekspektasi jangka panjang, bila sifatnya konsisten, berkesinambungan dan memperbaiki kepastian usaha, yang mencakup menurunnya risiko usaha dan membaiknya prospek pendapatan usaha.

Membaiknya perkembangan investasi, bukan saja diukur dari pertumbuhan investasi, tetapi juga dari perkembangan komposisi investasi dan perkembangan antara rencana investasi yang disetujui dengan investasi yang terealisasi. Perkembangan komposisi investasi dapat dilihat berdasarkan perkembangan investasi barang modal, residensial dan persediaan atau berdasarkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Menurut Horngren (1998), penggolongan investasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### *Investasi jangka panjang*

Investasi jangka panjang adalah investasi dalam bentuk saham, obligasi, tanah, dan bentuk lain yang dimiliki investor dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang itu sendiri terdiri dari investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Investasi dalam harta tetap berwujud yang saat ini digunakan dalam spekulasi seperti tanah yang ditahan untuk spekulasi. Investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun atau dana yang digunakan untuk perluasan pabrik, dan nilai penyerahan kas dari asuransi jiwa. Investasi dalam anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi.

#### *Investasi jangka pendek*

Investasi jangka pendek adalah investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dimiliki investor dalam jangka waktu yang relatif pendek. adanya usulan-usulan investasi, estimasi arus kas dari usulan-usulan investasi, evaluasi arus kas investasi, memilih proyek-proyek yang sesuai dengan criteria tertentu, dan monitoring dan penilaian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah investasi dilakukan.

Menurut Fahmi (2011), ada dua tipe investasi yang dapat dipilih yaitu :

#### *Investasi Langsung*

Investasi langsung (*direct investment*) yaitu mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu asset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Beberapa macam investasi langsung dirangkum sebagai berikut:

Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan (tabungan dan deposito)  
Investasi langsung dapat diperjual belikan, meliputi:

1. Investasi langsung di pasar uang (t-bill dan deposito yang dapat dinegosiasikan).
2. Investasi langsung di pasar modal, diantaranya: a) surat-surat berharga pendapatan tetap: T-bond, Federal agency securities, municipal bond, corporate bond, dan convertible bond; dan b) saham-saham (equity securities) : saham preferen dan saham biasa.
3. Investasi langsung di pasar turunan (opsi dan future contract).

#### *Investasi tidak Langsung*

Investasi tidak langsung (indirect investment) adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian asset keuangan cukup hanya memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja.

Proses keputusan investasi menurut Husnan (2004) adalah menunjukkan bagaimana investor memilih sekuritas, berapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Setiap melakukan keputusan investasi selalu saja memerlukan proses. Proses tersebut akan memberikan gambaran pada setiap tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan.

Menurut Fahmi (2011), secara umum proses manajemen investasi meliputi lima (5) langkah berikut:

1. Menetapkan sasaran investasi.  
 Penetapan sasaran berarti melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Penetapan sasaran investasi sangat disesuaikan dengan apa yang akan ditujukan pada investasi tersebut.
2. Membuat kebijakan investasi.  
 Tahap ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi, dan lainnya untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai hal dapat timbul pada saat dana tersebut tidak mapu untuk ditarik kembali.
3. Memilih strategi portofolio.  
 Ini menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sementara secara pasif hanya dapat dilihat pada indeks rata-rata atau dengan perkataan lain berdasarkan reaksi pasar saja, tanpa ada sikap atraktif.
4. Memilih asset.  
 Di sini pihak perusahaan berusaha memilih asset investasi yang nantinya akan member imbal hasil yang tertinggi (maximal return). Imbal hasil di sini dilihat sebagai keuntungan yang akan mampu dipeoleh.
5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja.  
 Tahap ini adalah menjadi tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini telah benar-benar maksimal atau belum. Jika belum, maka sebaiknya segera melakukan perbaikan agar kerugian tidak akan terjadi ke depan nantinya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penyusunan strategi percepatan investasi Kota Surabaya ini akan menggunakan dua dasar desain penelitian yaitu *Exploratory* dan *Descriptive Research* yang dilakukan secara bertahap. *Exploratory Research* bertujuan agar peneliti lebih mengenal lingkungan penelitian dengan mengeksplorasi teori berdasarkan data yang tersedia sehingga dapat disusun kerangka pemikiran. *Descriptive Research* berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan strategi percepatan investasi Kota Surabaya meliputi primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), yang dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2019 di kota Surabaya.

Tahap analisis yang akan digunakan meliputi analisis sebagai berikut:

a. *Location Quotien (LQ)*

Adalah merupakan suatu alat yang digunakan untuk menilai kinerja sektoral PDRB untuk melihat sektor mana yang basis sektor apa yang bukan basis. LQ dan digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. LQ juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas suatu daerah. Dalam perumusannya LQ ini membandingkan sektor tertentu kabupaten dibanding dengan sektor yang sama di Propinsi dibagi dengan Total PDRB kabupaten dibanding dengan Total PDRB Propinsi.

b. *Shift Share (SS)*

Proses transformasi ekonomi bisa berbeda antar propinsi yang selanjutnya bisa mengubah posisi suatu propinsi di dalam perekonomian nasional. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan seperti penyediaan bahan baku, teknologi, investasi, dan sumber daya manusia. Dengan adanya perbedaan tersebut maka diketahui transformasi ekonomi di suatu wilayah adalah penting terutama untuk pedoman dalam mengalokasikan dana pembangunan yang terbatas, sumberdaya manusia, teknologi dan input-input penting untuk produksi antar propinsi. Dalam hal ini analisis yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi perubahan struktur adalah analisis *Shift-Share*.

c. *Tipologi Klasen*

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi setiap wilayah tentunya masing-masing berbeda. Ada wilayah yang mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga dapat tumbuh pesat. Di sisi lain ada pula wilayah yang tak dapat berbuat banyak sehingga siklus ekonominya stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu lingkup referensi yang sama, maka dapat digunakan *Tipology Klassen* sebagai alat analisis.

**PEMBAHASAN**

***Investasi Kota Surabaya***

Potensi unggulan Kota Surabaya merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya saing di pasaran, baik karena ciri-cirinya yang khas, kualitasnya, maupun harganya yang kompetitif. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuhkembangkan. Investasi memiliki peranan penting dalam proses penumbuhkembangan potensi tersebut, karena menentukan dinamika pembangunan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama menghasilkan output yang efisien. Rasio perbandingan antara target dan realisasi Investasi di Kota Surabaya pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Rasio Perbandingan Target dan Realisasi Investasi**

Tahun	Penanaman Modal (Rp)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
2012	14.760.000.000.000	32.142,361.788.134	217,77%
2013	16.400.000.000.000	582.155.130.000	3,55%
2014	18.010.000.000.000	639.625.900.000	3,55%
2015	19.810.000.000.000	828.416.500.000	4,18%
2016	20.998.600.000.000	1.072.444.600.000	5,11%
2017	32.023.154.000.000	1.664.619.300.000	5,20%

*Sumber: BKPPM, Kota Surabaya*

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2012-2017 realisasi investasi Kota Surabaya lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan. Realisasi investasi Surabaya selalu berada di atas target yang sudah ditentukan. Capaian investasi tertinggi terjadi di tahun 2012, dimana realisasi investasinya 217,77% lebih besar dari target yang ditentukan.

### **Analisis Location Quotien (LQ)**

Berdasarkan tabel 4.2, maka dapat teridentifikasi sektor-sektor mana saja yang terdapat di Kota Surabaya yang merupakan sektor-sektor basis maupun sektor non basis. Kota Surabaya ini mempunyai 12 sektor basis, sektor tersebut yaitu Sektor Pengadaan Listrik & Gas dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.4287, Sektor Pengadaan Air dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.5694, Sektor konstruksi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.0868, Sektor Perdagangan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.5388, Sektor transportasi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 5.2556, Sektor Penyediaan Akomodasi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2.7662, Sektor informasi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.1553, Sektor real estat dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.5350, Sektor Jasa Perusahaan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2.9115, Sektor Jasa Kesehatan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.1736, Sektor jasa kesehatan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.5. Sektor basis yang terakhir adalah sektor jasa lainnya dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1.0135. Sehingga sektor tersebut merupakan sektor basis dengan indeks rata-rata terbesar.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotien (LQ) di Kota Surabaya Tahun 2016-2019**

<b>Sektor</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Rata2</b>	<b>Ket.</b>
Pertanian	0.0138	0.014	0.0138	0.0143	0.0140	Tidak Basis
Pertambangan	0.0013	0.0012	0.0011	0.001	0.0011	Tidak Basis
Industri Pengoahan	0.664	0.6627	0.6456	0.6542	0.6566	Tidak Basis
Pengadaan Listrik & Gas	1.5969	1.4108	1.3453	1.3617	1.4287	Basis
Pengadaan Air	1.5849	1.5765	1.5395	1.5768	1.5694	Basis
Konstruksi	1.11	1.0973	1.0591	1.0809	1.0868	Basis
Perdagangan	1.5533	1.556	1.5092	1.5365	1.5388	Basis
Transportasi	1.6789	1.6678	16.0341	1.6417	5.2556	Basis
Penyediaan Akomodasi	2.7908	2.787	2.7064	2.7806	2.7662	Basis
Informasi	1.1749	1.1687	1.1272	1.1503	1.1553	Basis
Jasa Keuangan	1.8904	1.8876	1.8417	1.8882	1.8770	Basis
Real Estat	1.5501	1.5441	1.4989	1.5469	1.5350	Basis
Jasa Perusahaan	2.946	2.9318	2.8397	2.9287	2.9115	Basis
Admin Pemerintah	0.5734	0.5666	0.5514	0.5772	0.5671	Tidak Basis
Jasa Pendidikan	0.8884	0.8828	0.8566	0.8906	0.8796	Tidak Basis
Jasa Kesehatan	1.208	1.1754	1.1411	1.1697	1.1736	Basis
Jasa Lainnya	1.0315	1.0251	0.9962	1.0013	1.0135	Basis

*Sumber: BPS, PDRB Kota Surabaya dan Jawa Timur (diolah)*

Hal ini menunjukkan bahwa dua belas sektor tersebut merupakan sektor basis yang menggambarkan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan berpotensi ekspor. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sektor yang merupakan sektor non basis selama periode 2014- 2017 terdapat lima sektor yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Admin Pemerintah, dan Sektor Jasa Lainnya. Nilai LQ dari lima sektor tersebut yaitu Sektor Pertanian dengan LQ rata-rata sebesar 0.0140, Sektor Pertambangan dengan LQ rata-rata sebesar 0.0011, Sektor Industri Pengolahan dengan LQ rata-rata sebesar 0.6566, Sektor Admin Pemerintah dengan LQ rata-rata sebesar 0.5671, dan Sektor Jasa Lainnya dengan LQ rata-rata sebesar 0.8796. Kelima sektor ini dalam berproduksi masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam Kota Surabaya bahkan mengimpor dari luar daerah.

Meskipun sektor basis merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, akan tetapi kita tidak boleh melupakan sektor non basis. Karena dengan adanya sektor basis tersebut maka sektor non basis dapat dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru.

**Analisis Shift Share**

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian daerah acuan yaitu wilayah yang lebih luas, dalam hal ini adalah wilayah Kota Surabaya dikaitkan dengan Propinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis Shift Share digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Sedangkan pertumbuhan PDRB total (G) dapat diuraikan menjadi komponen Shift dan Komponen Share yaitu:

- a. Komponen *National Share* (N) adalah banyaknya pertambahan PDRB seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi selama periode yang tercakup dalam studi.
- b. Komponen *Proportional Shift* (P), mengukur besarnya *Net Shift* Kota yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB pada Kota yang bersangkutan berubah. Apabila  $P_j > 0$  artinya Kota yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat propinsi tumbuh relatif cepat dan apabila  $P_j < 0$  berarti Kota yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor sektor yang di tingkat propinsi pertumbuhannya dengan lambat atau bahkan sedang merosot.
- c. Komponen *Differential Shift* (D), mengukur besarnya *Net Shift* yang diakibatkan oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di Kota yang bersangkutan dibandingkan dengan tingkat propinsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Daerah yang mempunyai keuntungan lokasional, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *Differential Shift Component* Positif ( $D_j > 0$ ), sebaliknya Kota yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai *Differential Shift Component* Yang Negatif ( $D_j < 0$ ).

**Tabel 3. Komponen Shift Share Kota Surabaya Tahun 2015-2019**

Tahun	G <sub>j</sub>	N <sub>j</sub>	G <sub>j</sub> -N <sub>j</sub>
2015 - 2016	306127.5	1262494.5	-956367
2016 - 2017	324215.4	1331375.8	-1007160
2017 - 2018	343652.6	1368560.9	-1024908
2018 - 2019	364714.8	1479147.5	-1114433

Sumber: BPS, PDRB Kota Surabaya dan Jawa Timur (diolah)

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 komponen pertumbuhan PDRB total Kota Surabaya (G<sub>j</sub>) adalah 306127.5 padahal banyaknya pertumbuhan PDRB Kota Surabaya apabila pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur (N<sub>j</sub>) sebesar 1262494.5 ini berarti terjadi penyimpangan negatif sebesar -956367 dan ini menunjukkan pertumbuhan PDRB di Kota Surabaya lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Timur.

Di tahun berikutnya 2016-2017 dari kedua komponen Gj dan Nj masing-masing mengalami peningkatan, namun walaupun penyimpangan yang terjadi mengalami peningkatan dan menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar -1007160 yang berarti pertumbuhan PDRB Kota Surabaya masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017-2018 untuk masing-masing komponen Gj dan Nj mengalami peningkatan lagi. penyimpangan yang terjadi juga mengalami perlambatan dengan angka negatif sebesar -1024908 hal ini berarti pada tahun ini pertumbuhan PDRB di Kota Surabaya juga lebih rendah dari pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2018-2019, komponen pertumbuhan ekonomi total Kota Surabaya (Gj) mengalami peningkatan menjadi sebesar 364714.8 dan komponen pertumbuhan ekonomi total Propinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 1479147.5 dan penyimpangan yang terjadi mengalami penurunan dengan angka negatif yaitu sebesar -1114433 hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB Kota Surabaya adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Timur.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor e konomi strategis dan potensial untuk dikembangkan guna memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi spesialisasi daerah serta pertumbuhannya digunakan komponen Proportional Shift (Pj) dan Differential Shift (Dj). untuk itu analisis selanjutnya adalah mencari sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat atau lambat dan sektor mana yang memiliki daya saing tinggi atau tidak, sehingga digunakan perhitungan terhadap komponen pertumbuhan *Proporsional Shift* dan komponen pertumbuhan *Diferensial Shift*.

**Tabel 4. Komponen Pertumbuhan Proportional (Pj) Kota Surabaya**

No	Sektor	PSS
1	Pertanian	-11.698
2	Pertambangan	-5.1773
3	Industri Pengoahan	-10.183
4	Pengadaan Listrik & Gas	0.1417
5	Pengadaan Air	0.0559
6	Konstruksi	0.7851
7	Perdagangan	9.9084
8	Transportasi	2.5833
9	Penyediaan Akomodasi	9.1773
10	Informasi	0.8665
11	Jasa Keuangan	2.2906
12	Real Estat	0.9281
13	Jasa Perusahaan	1.4921
14	Admin Pemerintah	-0.9795
15	Jasa Pendidikan	-0.3223
16	Jasa Kesehatan	0.1135
17	Jasa Lainnya	0.0178

*Sumber: BPS, Kota Surabaya dalam angka 2019*

Berdasarkan tabel 4 pertumbuhan komponen proporsional Kota Surabaya selama periode penelitian ini, diketahui bahwa nilai Proporsional Shift (Pj) Kota Surabaya dari tahun 2015-2019 nilainya ada yang positif dan ada yang negatif, hal ini berarti Kota Surabaya berspesialisasi pada sektor yang sama dengan sektor yang tumbuh cepat di perekonomian Propinsi Jawa Timur apabila nilai Pj rata-ratanya positif. Kota Surabaya berspesialisasi pada sektor yang sama dengan sektor yang tumbuh lambat di perekonomian Jawa Timur apabila nilai Pj rata-ratanya negatif.

Sektor sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan proporsional positif yaitu Sektor Pengadaan Listrik & Gas dengan nilai Pj sebesar 0.1417, Sektor Pengadaan Air

dengan nilai Pj sebesar 0.0559, Sektor Konstruksi dengan nilai Pj sebesar 0.7851, Sektor Perdagangan dengan nilai Pj sebesar 9.9084, Sektor Transportasi dengan nilai Pj sebesar 2.5833, Sektor Penyediaan Akomodasi dengan nilai Pj sebesar 9.1773, Sektor Informasi dengan nilai Pj sebesar 0.8665, Sektor Jasa Keuangan dengan nilai Pj sebesar 2.2906, Sektor Real Estat dengan nilai Pj sebesar 0.9281, Sektor Jasa Perusahaan dengan nilai Pj sebesar 1.4921, Sektor Jasa Kesehatan dengan nilai Pj sebesar 0.1135, dan Sektor Jasa Lainnya dengan nilai Pj sebesar 0.0178. Sedangkan sektor-sektor yang mempunyai memiliki nilai rata-rata komponen pertumbuhan proporsional negatif, yaitu Sektor Pertanian dengan nilai Pj sebesar -11.698; Sektor Pertambangan dengan nilai Pj sebesar -5.1773; Sektor Industri Pengoahan dengan nilai Pj sebesar -10.183; Sektor Admin Pemerintah dengan nilai Pj sebesar -0.9795; dan Sektor Jasa Pendidikan dengan nilai Pj sebesar -0.3223.

Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai Differential Shift (Dj) rata-rata sektor ekonomi Kota Surabaya dari tahun 2015-2019 nilainya ada yang positif dan ada yang negatif. Nilai yang positif ini menunjukkan bahwa di Kota Surabaya ada yang sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor ekonomi yang sama di tingkat Jawa Timur. Sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa sektor dengan nilai rata-rata negatif tersebut tumbuh lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama ditingkat Jawa Timur. Terdapat empat sektor di Kota Surabaya yang nilai Dj positif yaitu, Sektor Transportasi dengan nilai Dj sebesar 0.1574; Sektor Penyediaan Akomodasi dengan nilai Dj sebesar 8.3652; Sektor Informasi dengan nilai Dj sebesar 2.5538; dan Sektor Jasa Pendidikan dengan nilai Dj sebesar 0.2761.

**Tabel 5. Komponen Pertumbuhan Diferensial (Dj) Kota Surabaya**

No	Sektor	DSS
1	Pertanian	-1.0698
2	Pertambangan	-9.1221
3	Industri Pengoahan	-2.561
4	Pengadaan Listrik & Gas	-31.5695
5	Pengadaan Air	-0.1372
6	Konstruksi	-3.6635
7	Perdagangan	-0.0063
8	Transportasi	0.1574
9	Penyediaan Akomodasi	8.3652
10	Informasi	2.5538
11	Jasa Keuangan	-0.0534
12	Real Estat	-2.8533
13	Jasa Perusahaan	-1.0698
14	Admin Pemerintah	-4.0485
15	Jasa Pendidikan	0.2761
16	Jasa Kesehatan	-2.5507
17	Jasa Lainnya	-6.0668

*Sumber: BPS, Kota Surabaya dalam angka 2019*

Keempat sektor tersebut merupakan sektor yang pertumbuhannya cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kota Surabaya. Sedangkan tiga belas sektor lainnya yaitu: Sektor Pertanian dengan nilai Dj sebesar -1.0698, Sektor Pertambangan dengan nilai Dj sebesar -9.1221, Sektor Industri Pengolahan dengan nilai Dj sebesar -2.561, Sektor Pengadaan Listrik & Gas dengan nilai Dj sebesar -31.5695, Sektor Pengadaan Air dengan nilai Dj sebesar -0.1372, Sektor Konstruksi dengan nilai Dj sebesar -3.6635, Sektor Perdagangan dengan nilai Dj sebesar -0.0063, Sektor Jasa Keuangan dengan nilai Dj sebesar -0.0534, Sektor Real Estat dengan nilai Dj sebesar -2.8533, Sektor Jasa Perusahaan dengan nilai Dj sebesar -1.0698, Sektor Admin Pemerintah dengan nilai Dj sebesar -4.0485, Sektor Jasa Kesehatan dengan nilai Dj sebesar -2.5507, dan

Sektor Jasa Lainnya dengan nilai  $D_j$  sebesar -6.0668.  $D_j$  rata-ratanya negatif sehingga tiga belas sektor tersebut pertumbuhannya lambat. Kedua komponen Shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan Kota Surabaya yang bersifat intern dan ekstern, dimana “*Proportional Shift*” dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja dalam propinsi, dan “*Differential Shift*” adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan.

**Tipologi Sektoral**

Analisis ini mengembangkan hasil perhitungan indeks *Location Quotient* ( $LQ > 1$ ), komponen *differential shift* ( $D_j > 0$ ), dan komponen *proporsional shift* ( $P_j > 0$ ) untuk ditentukan tipologi sektoral. Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis serta komponen pertumbuhan internal dan eksternal. Dengan menggabungkan indeks LQ dengan komponen  $D_j$  dan  $P_j$  dalam analisis *Shift Share*. Tipologi sektor tersebut adalah sebagai berikut (Soerofi, 2005):

- Tipologi I : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata  $> 1$  dan pertumbuhan di Kota Surabaya lebih cepat dibandingkan propinsi ( $D_j$  rata-rata  $> 0$ ) meskipun di tingkat propinsi pertumbuhannya cepat ( $P_j$  rata-rata  $> 0$ ).
- Tipologi II : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata  $> 1$  dan pertumbuhan di Kota Surabaya lebih cepat dibandingkan dengan propinsi ( $D_j$  rata-rata  $> 0$ ) karena di tingkat propinsi pertumbuhannya lambat ( $P_j$  rata-rata  $< 0$ ).
- Tipologi III : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata  $> 1$  dan di Kota Surabaya pertumbuhannya lebih lambat dibanding propinsi ( $D_j$  rata-rata  $< 0$ ) karena di tingkat propinsi pertumbuhannya cepat ( $P_j$  rata-rata  $> 0$ ).
- Tipologi IV : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata  $> 1$  dan di Kota Surabaya pertumbuhannya lebih lambat dibanding propinsi ( $D_j$  rata-rata  $< 0$ ) padahal di tingkat propinsi pertumbuhannya juga lambat ( $P_j$  rata-rata  $< 0$ ).
- Tipologi V : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan LQ rata-rata  $< 1$  dan pertumbuhan di Kota Surabaya lebih cepat di banding pertumbuhan di tingkat propinsi ( $D_j$  rata-rata  $> 0$ ) padahal di propinsi sendiri pertumbuhannya juga cepat ( $P_j$  rata-rata  $> 0$ ).
- Tipologi VI : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan LQ rata-rata  $< 1$  dan pertumbuhan di Kota Surabaya lebih cepat di banding pertumbuhan di tingkat propinsi ( $D_j$  rata-rata  $> 0$ ) meskipun di propinsi sendiri pertumbuhannya lambat ( $P_j$  rata-rata  $< 0$ ).
- Tipologi VII : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan LQ rata-rata  $< 1$  dan pertumbuhan di Kota Surabaya lebih lambat di banding propinsi ( $D_j$  rata-rata  $< 0$ ) karena di tingkat propinsi sendiri pertumbuhannya juga ( $P_j$  rata-rata  $> 0$ ).
- Tipologi VIII : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan LQ rata-rata  $< 1$  dan pertumbuhan di Kota Surabaya lebih lambat di banding propinsi dengan  $D_j$  rata-rata  $< 0$  meskipun di tingkat propinsi sendiri pertumbuhannya lambat ( $P_j < 0$ ).

**Tabel 6. Makna Tipologi Sektor Ekonomi**

Tipologi	LQ Rata-rata	$D_j$ Rata-rata	$P_j$ Rata-rata	Tingkat Potensial
I	( $LQ > 1$ )	( $D_j > 0$ )	( $P_j > 0$ )	Istimewa
II	( $LQ > 1$ )	( $D_j > 0$ )	( $P_j < 0$ )	Baik sekali
III	( $LQ > 1$ )	( $D_j < 0$ )	( $P_j < 0$ )	Baik
IV	( $LQ > 1$ )	( $D_j < 0$ )	( $P_j < 0$ )	Lebih dari cukup
V	( $LQ < 1$ )	( $D_j > 0$ )	( $P_j > 0$ )	Cukup
VI	( $LQ < 1$ )	( $D_j > 0$ )	( $P_j < 0$ )	Hampir dari cukup
VII	( $LQ < 1$ )	( $D_j < 0$ )	( $P_j > 0$ )	Kurang
VIII	( $LQ < 1$ )	( $D_j < 0$ )	( $P_j < 0$ )	Kurang sekali

Sumber: Soerofi, 2005.

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa sektor ekonomi dalam Tipologi I merupakan sektor yang tingkat kepotensialnya “*istimewa*” untuk dikembangkan karena sektor tersebut merupakan sektor basis ( $LQ > 1$ ). Selain itu, di Kota Surabaya pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan tingkat propinsi ( $Dj > 0$ ), meskipun di tingkat propinsi juga tumbuh dengan cepat. ( $Pj$  rata-ratanya positif). Sektor ini akan mendatangkan pendapatan yang tinggi dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan PDRB Kota Surabaya.

Dengan mempertimbangkan parameter seperti pada tabel 5 di atas ( $LQ$ ,  $Dj$  dan  $Pj$ ), maka masing-masing tipologi dapat dimaknai bahwa sektor ekonomi yang masuk Tipologi II adalah sektor yang tingkat kepotensialnya “*baik sekali*”, untuk dikembangkan, Tipologi III “*baik*”, Tipologi IV “*lebih dari cukup*”, Tipologi V “*cukup*”, Tipologi VI “*hampir dari cukup*”, Tipologi VII “*kurang*”, Tipologi VIII “*kurang sekali*”.

**Tabel 7. Pembagian Sektor Ekonomi Kota Surabaya Berdasarkan Tipologinya**

Tipologi	Sektoral	LQ Rata-rata	Dj Rata-rata	Pj Rata-rata	Tingkat Potensial
I	Transportasi	5.2556	0.1574	2.5833	Istimewa
	Penyediaan Akomodasi	2.7662	8.3652	9.1773	
	Informasi	1.1553	2.5538	0.8665	
II	-	-	-	-	Baik sekali
III	Pengadaan Listrik & Gas	1.4287	-31.5695	15.23	Baik
	Pengadaan Air	1.5694	-0.1372	0.0559	
	Konstruksi	1.0868	-3.6635	0.7851	
	Perdagangan	1.5388	-0.0063	9.9084	
	Jasa Keuangan	1.877	-0.0534	2.2906	
	Real Estat	1.535	-2.8533	0.9281	
	Jasa Perusahaan	2.9115	-1.0698	1.4921	
	Jasa Kesehatan	1.1736	-2.5507	0.1135	
Jasa Lainnya	1.0135	-6.0668	0.0178		
IV	Jasa Pendidikan	0.8796	0.2761	-0.3223	Lebih dari cukup
V	-	-	-	-	Cukup
VI	-	-	-	-	Hampir dari cukup
VII	-	-	-	-	Kurang
VIII	Pertanian	0.014	-1.0698	-	Kurang sekali
	Pertambangan	0.0011	-9.1221	-5.1773	
	Industri Pengoahan	0.6566	-2.561	-	
	Admin Pemerintah	0.5671	-4.0485	-0.9795	

Sumber: BPS, PDRB Kota Surabaya dan Jawa Timur (diolah)

Berdasarkan pada tabel 7 dapat diketahui, sektor ekonomi yang masuk di tipologi I dengan tingkat potensial “*istimewa*” terdapat tiga sektor yaitu, sektor Transportasi, sektor Penyediaan Akomodasi dan sektor Informasi. Pada tipologi ke III terdapat Sembilan sektor diantaranya: Sektor Pengadaan Listrik & Gas, Sektor Pengadaan Air, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Keuangan, Sektor Real Estat, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Kesehatan, dan Sektor Jasa Lainnya. Sedangkan sektor ekonomi yang masuk di tipologi IV dengan tingkat potensial “*lebih dari cukup*” adalah sektor Jasa Pendidikan. Terakhir, sektor ekonomi Kota Surabaya yang berada di tipolgi VIII dengan tingkat potensial

“kurang sekali” diantaranya: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri Pengolahan, Dan Sektor Admin Pemerintah.

### **Potret Investasi di Kota Surabaya**

Berdasarkan dari letak Wilayah serta peluang dan potensi yang ada di Surabaya, tidak salah jika Surabaya memiliki potensi sentral yang menjadikan Surabaya sebagai pintu gerbang bagi masuknya arus investasi, barang atau jasa antar daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa timur khususnya warga Surabaya pada khususnya. Secara letak posisi geografis sebenarnya Surabaya berpotensi untuk mengubah pola pertumbuhan ekonomi secara regional bahkan nasional karena secara geografis letak wilayah Surabaya yang berada di jantung pusat kota Propinsi Jawa Timur. Sejalan dengan potensi tersebut, pemerintah Kota Surabaya sangat serius mengembangkan potensi daerahnya. Namun, pada umumnya daerah kabupaten/kota masih dihadapkan beberapa sumber yang menjadi kendala berinvestasi ada beberapa poin penting yang sangat mempengaruhi pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya di suatu tempat, antara lain: Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Investasi, Masalah dan Hambatan Birokrasi, Ketidakpastian Dalam Interpretasi dan Implementasi Otonomi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Permasalahan Kebijakan Ketenagakerjaan, Tingkat Korupsi yang Masih Tinggi, Kurangnya Insentif Bidang Pajak Maupun Non-Pajak, Rendahnya Jaminan dan Perlindungan Investasi, Lemahnya Penegakan dan Kepastian Hukum, Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat beberapa poin pokok berkaitan dengan kendala pelaksanaan penanaman modal di Wilayah Surabaya, diantaranya: 1) jika ditinjau secara yuridis, sebenarnya sudah tidak ada lagi hambatan bagi para pelaku bisnis untuk menanamkan modalnya di Surabaya. Hal ini didukung oleh PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan PP No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. Peraturan ini jelas bertujuan untuk memperlancar kegiatan pengembangan Wilayah Surabaya terutama dengan dilimpahkannya Pada bidang penanaman modal sendiri, pihak DPM-PTSP telah mendirikan sistem pelayanan satu atap yang mempunyai tugas untuk mempermudah birokrasi bagi calon investor di Wilayah Surabaya. Seperti mengenai pengurusan Izin terkait investasi langsung dapat diurus melalui DPM-PTSP Kota Surabaya yang salah satunya adalah pada bidang Penanaman Modal. Namun kenyataannya, masih perlu ditingkatkan lagi terkait realisasi investasi yang masuk wilayah ini; 2) untuk mengundang minat investor berinvestasi bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan upaya yang serius, sistematis, terintegrasi dan konsisten untuk menanamkan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Wilayah Surabaya, Artinya memang aspek kepastian hukum dan gagasan lembaga pemerintah terutama Pemerintah Kota Surabaya memiliki kontrol dan harus menjamin hal-hal yang akan dilakukan oleh investor harus stabil dan berjalan lancar, dan mampu membuat perubahan terutama terkait dengan investasi yang pada akhirnya menuju kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut wilayah Surabaya memiliki potensi fisik, namun kelengkapan-kelengkapannya seperti SDM dan kesisteman masih perlu ditingkatkan lagi agar betul-betul memberikan komitmen penuh bagi pembangunan Wilayah Surabaya secara mandiri. Wilayah Surabaya memerlukan kesiapan kelembagaan yang dalam waktu singkat harus mampu bertaraf internasional, sehingga ia dapat secara jangka pendek sudah mulai memberikan peran sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan dalam Master Plan Wilayah Surabaya.

Wilayah Surabaya harus dapat diintegrasikan dalam sistem kepelabuhanan yang ada diwilayah Regional maupun Nasional, bahkan harus dapat dikaitkan secara internasional dengan wilayah-wilayah pelabuhan internasional lainnya. Selanjutnya, memerlukan perhatian khusus dan rencana jangka panjang yang dapat dijabarkan dengan tahapan pembangunan, dimana akan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang merugikan secara jangka panjang, sehingga Wilayah Surabaya dapat berkembang secara benar dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, secara eksternal yang mempengaruhi fungsi pengembangan penanaman modal di wilayah ini faktor kenyamanan berinvestasi, Jika melihat kondisi Wilayah Surabaya secara keseluruhan, maka Kota Surabaya ini dapat dikatakan telah aman tetapi masih diperlukan upaya dalam meningkatkan ketertiban dari masyarakatnya. Tertib yang dimaksud disini, termasuk dengan kegiatan penjagaan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan untuk menciptakan suasana kebersihan dan keindahan wilayah.

### **Pengembangan Sektor Potensial di Kota Surabaya**

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan analisis LQ, Shift Share dan analisis tipologi sektoral, maka dapat diketahui masing-masing potensi sektor ekonomi Kota Surabaya. Setelah diketahui potensi tiap sektor, selanjutnya diharapkan adanya pengelolaan yang lebih terfokus pada sektor yang lebih mampu mendorong perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Dengan menitik beratkan pada sektor-sektor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian sehingga diharapkan hasilnya dapat optimal. Dalam penelitian ini analisis pengembangan sektor potensial di Kota Surabaya, terdapat tiga sektor potensial diantaranya: Sektor Transportasi, Sektor Penyediaan Akomodasi, dan Sektor Informasi.

Dilihat dari kondisi yang ada, kota Surabaya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan peran kota Surabaya sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia timur. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya. Kota Surabaya mempunyai posisi yang sangat strategis dan sekaligus mempunyai nilai ekonomis sebagai pengemban ketiga sektor potensial yaitu: Sektor Transportasi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Sektor Informasi yang ditunjang dengan infrastruktur yang cukup engkap.

Dari struktur perekonomiannya, Surabaya dominan di sektor sekunder dan tersier, dan lemah pada sektor primer karena hanya memberikan peranan dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya yang kurang dari 1 persen. Sektor primer pada tahun 2011 memberikan kontribusi yang besarnya sedikit mengalami penurunan dalam pembentukan PDRB kota Surabaya dibandingkan dengan kontribusinya dalam pembentukan PDRB pada tahun 2010. Sedangkan untuk kontribusi sektor potensial terhadap perekonomian Surabaya cukup besar. Selanjutnya, Lebih dari 27 persen nilai PDRB Kota Surabaya tahun 2016 dibentuk dari nilai lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai mencapai lebih dari 137 triliun rupiah. Lapangan usaha berikutnya dengan nilai terbesar adalah Industri pengolahan yang berkontribusi 18,74 persen. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menempati peringkat ke-5 dengan nilai 26,57 triliun atau 5,37 persen.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil indeks *Location Quotient* (basis dan non basis), komponen *Differential Shift* (komponen pertumbuhan internal), dan komponen *Proporsional Shift* (komponen pertumbuhan eksternal) serta ditentukan tipologi sektoral terhadap sektor-sektor ekonomi menerangkan bahwa terdapat tiga sektor potensial di wilayah Kota Surabaya yaitu: Sektor Transportasi, Sektor Penyediaan Akomodasi, dan Sektor Informasi.

Dilihat dari kondisi yang ada, kota Surabaya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan peran kota Surabaya sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia timur. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya. Kota Surabaya mempunyai posisi yang sangat strategis dan sekaligus mempunyai nilai ekonomis sebagai pengemban ketiga sektor potensial yaitu: Sektor Transportasi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Sektor Informasi yang ditunjang dengan infrastruktur yang cukup engkap.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan investasi menyebutkan beberapa permasalahan investasi di Indonesia maupun di kabupaten/Kota di Indonesia adalah inefisiensi birokrasi dan instabilitas kebijakan, dari sisi politik bisa digambarkan melalui ketidaksinkronan peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan dari sisi ekonomi seperti regulasi perburuhan yang kaku, upah minimum regional yang memberatkan

pengusaha, regulasi perpajakan/retribusi yang rumit dan lain sebagainya. Selanjutnya, masih minimnya infrastruktur seperti jalan raya, listrik, pelabuhan; minimnya akses pembiayaan khususnya bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM); serta permasalahan promosi investasi/pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Setidaknya ada empat kebijakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat Investasi di wilayah Surabaya sesuai dengan hasil kajian; a) peningkatan efisiensi birokrasi melalui penyerderhanaan prosedur perijinan usaha, regulasi dan *Law Enforcement*, serta sistem pengajuan usaha online yang terintegrasi dengan sistem perbankan; b) kebijakan peningkatan infrastruktur dengan memperluas infratraktur fisik melalui penyediaan fasilitas utama; Koordinasi antara departemen dan dinas terkait di berbagai tingkat pemerintahan seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen ESDM dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur; serta pengembangan kapasitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur; c) perluasan akses pembiayaan dengan program memfasilitasi akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM; memfasilitasi/memediasi pengusaha dan perbankan; dan d) peningkatan kerjasama dan promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui gelar potensi dan temu usaha.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai strategi percepatan investasi Kota Surabaya, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah baik pusat maupun daerah Kota Surabaya khususnya, yaitu: Sektor basis yang didominasi oleh sektor tersier, harus tetap dikembangkan dengan lebih baik lagi oleh pemerintah Kota Surabaya dengan cara memberikan dana insentif untuk investasi yang diarahkan untuk kemajuan sektor basis. Selain itu, pemerintah perlu untuk meningkatkan akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM melalui berbagai kebijakan maupun himbuan kepada lembaga- lembaga keuangan bank dan nonbank. Selanjutnya, diperlukan sebuah terobosan baru/Inovasi dalam hal promosi dan kerjasama baik didalam maupun luar negeri dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia.

### REFERENSI

- Anonim, 2016. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-JAWA TIMUR periode 2016, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Surabaya.
- Arsyad, Lincoln, 2002. Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua). Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Erlangga, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2016. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2007. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi), Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (edisi ke VII) Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sukirno, S. 2010. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Kencana, Jakarta.
- Mankiw, N.G. 2007. Makroekonomi. Edisi Keenam. Fitria Liza dan Imam Nurmawan (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, di akses 12 Maret 2020.
- Anonim, 1999, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Penerbit Kuraiko Pratama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2018, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2019, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.

- Basri, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI (Distorsing, Peluang dan Kendala)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dasril, Henry & Hessel, 2004, *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Elmi, Bchrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1993, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, cetakan kedua, Penerbit PT. Bina Aksaram Jakarta.
- Khusaini, 2006, *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Penerbit BPF UNIBRAW, Malang.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Permendagri, No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- Permendagri, No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Saragih, Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia
- Stat. Daniel dan Inge Hovlan, 2012, <http://Subliyanto, Wordpress, com /2012/12/13 /analisis-swot/>.
- Syafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES, 3,27-38.
- Syafrizal, 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Today, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Bumi Aksara